Akad dalam *Student Loan*; Analisis Implementasi di BMT UMY

Fitri Raya¹⁾, Muhamad Turmudi²⁾, Eva Savanda³⁾

^{1),2),3)} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Abstract

Educational financing remains one of the major challenges in higher education, especially for students who require financial support to continue their studies. One emerging solution is the student loan program offered by Islamic microfinance institutions, such as BMT UMY. This article aims to analyze the implementation of Islamic contracts (akad) in the educational financing program provided by BMT UMY, with a focus on the conformity to Sharia principles. This research falls under the category of field research, emphasizing observation and the collection of primary data through direct interaction with the subjects or objects studied. Using a qualitative approach, this study explores the types of contracts applied in the educational financing program, such as murabahah, mudharabah, and musyarakah, as well as how BMT UMY adapts these contracts to ethically and transparently meet the needs of students. The analysis also discusses the challenges and benefits faced by the institution, students, and other related stakeholders in the implementation of the program. The findings indicate that BMT UMY has successfully integrated Sharia principles into its educational financing model, although challenges remain in terms of product socialization and risk management. This article is expected to contribute to the development of a comprehensive and sustainable Sharia-based model for educational financing in the future.

Keywords: Education financing, student loans, BMT UMY, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*.

Abstrak

Pembiayaan pendidikan menjadi satu diantara tantangan besar dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan dana untuk melanjutkan studi. Salah satu solusi yang berkembang adalah program student loan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT UMY. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad dalam program pembiayaan pendidikan yang disediakan oleh BMT UMY, dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yang menekankan pada pengamatan dan pengumpulan data primer melalui interaksi langsung dengan subjek atau objek yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi jenis-jenis akad yang diterapkan dalam pembiayaan pendidikan, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta bagaimana BMT UMY mengadaptasi akad-akad tersebut untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa secara etis dan transparan. Analisis ini juga membahas tantangan dan manfaat yang dihadapi oleh lembaga, mahasiswa, serta pihak-pihak terkait dalam implementasi program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UMY berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan pendidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi produk dan pengelolaan risiko pembiayaan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembiayaan pendidikan berbasis syariah yang menyeluruh dan berkesinambungan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembiayaan pendidikan, *student loan*, BMT UMY, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*.

PENDAHULUAN

Kemajuan sosial-ekonomi dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia negara sangat bergantung pada pendidikan. Akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas di Indonesia, terutama karena biaya tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar orang. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, menawarkan berbagai program pembiayaan untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan mereka. Pinjaman pendidikan, juga dikenal sebagai program *student loan*, adalah salah satu jenis pembiayaan pendidikan yang semakin populer.¹

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengembangkan produk pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa. BMT UMY menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan, dengan memastikan bahwa transaksi yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan syariah Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari aturan-aturan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT UMY menggunakan beberapa jenis akad syariah dalam menjalankan program *student loan*, antara lain akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Penelitian ini berpusat pada pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan perjanjian dalam program pinjaman mahasiswa di BMT UMY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak akad syariah dalam pembiayaan pendidikan di BMT UMY dan bagaimana lembaga ini mengubahnya untuk memberikan manfaat terbaik bagi mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh BMT UMY saat menjalankan program pembiayaan pendidikan ini, serta mengevaluasi potensi manfaat dari implementasi akad syariah ini. Pemilihan BMT UMY sebagai objek penelitian dalam studi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan dan fokus kajian mengenai implementasi akad dalam pembiayaan pendidikan berbasis syariah. *Pertama*, BMT UMY merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang secara aktif mengembangkan program pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa, suatu inisiatif yang masih relatif jarang ditemukan di lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini menjadikan BMT UMY sebagai contoh menarik dalam mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara praktis dalam sektor pendidikan tinggi. *Kedua*, keberadaan BMT UMY yang berada dalam lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan akses yang lebih luas terhadap mahasiswa sebagai penerima manfaat program. Interaksi yang intens antara lembaga dan mahasiswa memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika implementasi akad, mulai dari proses pengajuan hingga pelaksanaan pembiayaan. *Ketiga*, BMT UMY dikenal sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam pembiayaan. Komitmen ini memberikan ruang yang baik untuk meneliti bagaimana akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* diadaptasi dalam konteks pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, BMT UMY menjadi pilihan yang relevan dan strategis untuk memahami implementasi akad syariah dalam pembiayaan pendidikan secara mendalam dan kontekstual, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembiayaan pendidikan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

¹ Yayuk Purwati, "Strategi Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam Melalui Tanggung Jawab Sosial (SCR) Studi Kasus BANK BRI Syariah," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 65-78.

Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai barang dan jasa berbasis syariah, seperti pembiayaan pendidikan. Salah satu contoh lembaga pembiayaan pendidikan tinggi yang berprinsip syariah di Indonesia adalah BMT UMY, yang menawarkan program pinjaman mahasiswa dengan tujuan memberikan akses lebih besar bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka tanpa terjebak dalam beban riba yang terkait dengan pinjaman tradisional. Meskipun produk pembiayaan pendidikan syariah memiliki banyak kemungkinan dan keuntungan yang sangat besar, ada tantangan untuk menerapkan akad syariah di dalamnya. Di antaranya adalah kesulitan untuk memastikan bahwa setiap aspek transaksi tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, serta tantangan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan program pembiayaan tersebut. Sebaliknya, menjelaskan manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah juga merupakan tantangan tersendiri. Selain itu, diperlukan untuk memperkenalkan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat umum. Ada kemungkinan bahwa penerapan akad syariah dalam pembiayaan pelajar akan menjadi pilihan yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara BMT UMY menerapkan akad syariah dalam pembiayaan pendidikan dan bagaimana hal itu berdampak pada siswa yang mengakses fasilitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan lebih menekankan pada pengamatan dan pengumpulan data primer melalui interaksi langsung dengan subjek atau objek yang diteliti. Dalam berbagai bidang ilmu, seperti ilmu sosial, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, penelitian ini biasanya dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena atau masalah yang terjadi di masyarakat.² Data ini diperoleh dari sumber primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan observasi. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam untuk mendalami tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku individu. Tentu saja, subjek penelitian adalah pinjaman mahasiswa dan perilaku ekonomi mahasiswa. Setelah data diperoleh, analisis deskriptif analitis dilakukan, untuk menganalisis pelaksanaan program *student loan* di BMT UMY, peneliti mewawancarai mahasiswa yang menggunakan layanan tersebut dan manajemen BMT UMY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Student Loan* Perspektif Ekonomi Syariah**

Pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional, dan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan pilar utama dalam upaya ini. Karena meningkatkan akses ke pendidikan berarti lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, meningkatkan akses ke pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, menjadi komponen utama evaluasi sektor pendidikan.

Student loan atau pinjaman mahasiswa sering menjadi perdebatan dalam perspektif ekonomi syariah karena melibatkan elemen riba, atau bunga, yang dilarang dalam Islam. Pembiayaan pendidikan yang mengikuti prinsip ekonomi syariah tidak hanya membantu

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2005). 6.

siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka, tetapi juga membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi ini, pendidikan akan menjadi lebih mudah diakses dan akan berdampak positif baik pada masyarakat secara keseluruhan maupun pada individu. Studi tentang pinjaman mahasiswa juga dikenal sebagai student loan sangat menarik dan relevan di zaman sekarang, terutama karena melibatkan prinsip-prinsip keuangan yang tidak hanya sejalan dengan hukum Islam tetapi juga dapat menawarkan solusi etis alternatif untuk sistem pendidikan. Sangat penting untuk mempelajari cara mengelola pinjaman yang sesuai dengan nilai-nilai syariah mengingat biaya pendidikan tinggi semakin meningkat.

Ekonomi syariah menekankan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama, dan setiap transaksi keuangan harus menguntungkan semua pihak serta mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Model pembiayaan mahasiswa yang lebih adil dan inklusif dapat digunakan untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, skema pinjaman mahasiswa yang sesuai dengan prinsip syariah seharusnya tidak hanya berfokus pada memberikan dana untuk pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi finansial mahasiswa setelah mereka lulus kuliah.

Model pembiayaan yang lebih adil dapat mencakup program yang membantu siswa yang mengalami masalah keuangan setelah lulus sekolah atau bahkan menghilangkan pinjaman mereka. Ini penting karena beberapa lulusan tidak dapat mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai langsung, sehingga pinjaman dapat menghalangi mereka untuk membangun kehidupan yang stabil. Mahasiswa yang belum mencapai tingkat pendapatan tertentu dapat diberikan keringanan dalam pembayaran atau penundaan pengembalian tanpa dikenakan bunga atau denda keterlambatan dalam skema yang didasarkan pada prinsip syariah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan pinjaman mahasiswa berdasarkan ekonomi syariah:³

1. Prinsip keadilan dalam pembiayaan
2. Larangan riba
3. Prinsip tanggung jawab sosial
4. Pembagian risiko dalam akad syariah
5. Transparansi dan kejelasan dalam proses pembiayaan

Konsep Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertugas mengelola dana umat untuk memperkuat perekonomian masyarakat, terutama yang memiliki perekonomian rendah, mempunyai dua fungsi utama, yaitu :⁴

1. *Baitul Māl*, yang dikenal rumah harta, mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah serta memastikan pendistribusiannya dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan.
2. *Baitul Tamwil*, juga dikenal sebagai rumah pengelola harta, bertujuan untuk mendorong usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil dengan mempromosikan kebiasaan menabung serta mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.

Perkembangannya, BMT dapat dianggap sebagai salah satu ide ekonomi Islam di bidang keuangan. BMT adalah lembaga keuangan dengan tujuan nirlaba (sosial). Zakat, infak,

³ Sami' Abdul Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Pusata Pelajar, 2014).10-13.

⁴ Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cetakan Ke. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 447.

dan *sadaqah* adalah sumber dananya, yang diberikan kepada *mustahiq* (yang berhak) atau untuk kepentingan umum. Selain itu, BMT juga dapat dianggap sebagai lembaga keuangan dengan tujuan mengumpulkan dan memberikan dana kepada masyarakat dengan tujuan keuntungan. Dana yang dikumpulkan dikumpulkan melalui simpanan dari pihak ketiga, dan diberikan sebagai investasi atau pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Oleh karena itu, BMT adalah perpaduan antara dua jenis usaha yang berbeda, meskipun dilaksanakan dengan tujuan laba dan nirlaba dalam satu lembaga, secara operasional tetap merupakan entitas yang berbeda. Ada dua jenis kegiatan yang dilakukan dalam BMT: jasa keuangan atau pengembangan zakat, infak, *shadaqah* (ZIS) dan sektor riil. Karena masing-masing memiliki karakteristik unik, masing-masing dianggap sebagai entitas (badan). Ini menunjukkan bahwa pengelola dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bekerja sama. Sebelum melakukan penilaian menyeluruh atas kinerja BMT, penilaian kinerjanya juga harus dilakukan secara terpisah. Yang paling penting adalah bahwa semua upaya BMT harus didasarkan pada prinsip muamalah (ekonomi) Islam.⁵ Tidak ada batasan untuk total dana yang bisa dikumpulkan lewat BMT, tapi BMT harus memiliki kemampuan untuk mencari dan menggabungkan berbagai sumber dana ke dalam produknya sehingga mempunyai nilai pasar yang pantas. Dalam mengumpulkan dana BMT mempunyai prinsip dengan menganut akad *wadi'ah* dan *mudharabah*:

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip simpanan *wadi'ah*, yang berarti "titipan", mengacu pada akad penitipan barang atau uang kepada BMT. Penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut dalam dua kategori:⁶

- a. *Wadi'ah al-amanah* adalah perjanjian yang melarang penerima titipan untuk memanfaatkan barang yang diberikan. BMT dapat meminta pembayaran kepada penitip (*muawadi'*) sebagai kompensasi atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasi produk.
- b. *Wadi'ah ad-dhamanah* perjanjian yang memberikan hak kepada penerima titipan untuk menggunakan barang yang diserahkan, dengan syarat bahwa jika pemilik barang ingin mengambilnya kembali, barang tersebut harus dikembalikan dengan kondisi asal. Penerima titipan akan mendapatkan bonus sebagai ketidaksamaan atas perjanjian ini, yang besarnya bergantung pada kebijakan manajemen BMT.

2. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* adalah perjanjian kemitraan modal antara *shohibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan tujuan memperoleh hasil. Penyaluran dana dan pembiayaan adalah operasi operasional yang tidak kalah penting dalam BMT. Pembiayaan BMT dapat di kategorikan menjadi dua bagian yaitu pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan yang digunakan untuk menyelesaikan barang-barang permodalan (*capital goods*) dan fasilitas lain yang terkait dengannya disebut pembiayaan investasi. Namun, tujuan pembiayaan modal kerja yaitu untuk pemenuhan dan peningkatan produksi, ini berlaku untuk semua sektor ekonomi.⁷

BMT bukan hanya lembaga keuangan non-bank dengan tujuan sosial, tetapi juga lembaga bisnis yang bekerja untuk meningkatkan ekonomi global. Oleh karena itu, uang yang dikumpulkan oleh anggota harus diberikan kepada anggota yang kurang beruntung. Pembiayaan biasanya digunakan untuk memberikan dana kepada anggota tersebut. Fokus

⁵ Sami' Abdul Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*.14.

⁶ M. Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). 36.

⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Munuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: Debeta, 2008). 151.

pembiayaan BMT kepada anggotanya adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sektor ekonomi yang membutuhkan dana adalah sasaran pembiayaan ini, seperti jasa, perdagangan, industri rumah tangga dan pertanian. Di BMT, ada tiga (tiga) cara untuk membuat produk penyaluran dana, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk usaha kerja sama untuk mendapatkan barang dan jasa berdasarkan prinsip hasil

Dalam bahasa Arab, prinsip hasil (*syirkah*) berarti kombinasi atau interaksi. Ini juga dapat berarti membagi sesuatu antara dua orang atau lebih sesuai dengan kebiasaan. Namun, dalam ilmu fiqh, *syirkah* didefinisikan sebagai kumpulan upaya untuk memperoleh hak. Karena fungsinya sebagai pengganti bunga, akad bagi hasil adalah yang paling dikenal di masyarakat dalam transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam praktiknya, BMT memakai akad ini dalam dua sisi yaitu sisi penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*leanding*). Melalui produk pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah dapat diidentifikasi beberapa jenis pembiayaan yaitu:

- a. *Pembiayaan Mudarabah*

Merupakan kerja sama dua pihak atau bisa lebih, antara yang memiliki modal (*sahibul mal*) dimana mempercayakan modal pada pengelola (*mudarib*) dengan akad atau perjanjian keuntungan.⁸ Modal sepenuhnya dari *sahibul māl* dengan keahlian *mudarib* digunakan dalam bentuk kerja sama ini. Ketentuan umum yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Total modal diberikan harus secara tunai pada anggota sebagai pengelola modal, baik dalam bentuk uang atau barang dengan uang dalam satuan nilai. 2
- 2) Ketika uang diserahkan secara bertahap maka prosesnya harus transafaran dan disetujui secara keseluruhan.
- 3) BMT dapat memperhitungkan hasil pengelolaan pembiayaan mudarabah dalam 2 cara yaitu pertama, pada bulan dan tanggal yang ditetapkan hasil usaha harus dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang menggung kesalahan atau kelalian pengusaha adalah yang memiliki modal yaitu BMT. Kedua, Meskipun BMT memiliki hak untuk mengawasi proses tersebut, mereka tidak boleh mengganggu pekerjaan anggota. Anggota dapat terkena sanksi jika mereka cidera dengan sengaja.

- b. *Pembiayaan Musyarakah*

Merupakan dua pihak yang bekerjasama dalam usaha. Pada akad musyarakah, ada beberapa persyaratan umum:

- 1) Semua modal dikumpulkan dan dikelola bersama untuk menjadi modal proyek *musyarakah*.
- 2) Setiap pemilik modal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan bisnis yang digerakkan oleh pelaksana usaha.
- 3) Tanpa izin pemilik modal pengelola modal yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan proyek musyarakah tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang seeperti menggabungkan dana pribadi dan da aproyek atau membuat kerja sama dengan pihak ketiga tanpa meminta izin terlebih dahulu.
- 4) Semua pemilik modal memiliki hak untuk memindahkan partisipasi mereka atau menggantikannya dengan orang lain.

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
65.

- 5) Semua pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama jika mereka menarik diri, meninggal, atau cacat hukum. Dokumentasi proyek, diskusi tentang biaya, dan jangka waktunya harus dilakukan.
2. Transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

Barang sebagai objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah, salam, dan istishna adalah contoh aplikasi akad jual beli ini dalam transaksi BMT. Jenis pembiayaan tersebut didefinisikan sebagai berikut:⁹

a. *Pembiayaan Murabahah*

Merupakan jual beli barang menggunakan harga pokok barang ditambahkan keuntungan yang sudah diputuskan bersama dengan jelas. Karena memiliki kemudahan saat digunakan, menguntungkan dan memiliki risiko yang rendah, murabahah menjadi salah satu produk yang paling disukai. Dalam operasinya, BMT membeli dan menjual barang halal yang dibutuhkan anggota dengan harga tertentu oleh pihak ketiga baik dengan cara langsung atau melalui orang lain yang sudah ditugaskan. Selanjutnya, setelah harga yang disepakati bersama, setelah ditambahkan keuntungan maka barang tersebut akan dijual. BMT tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah dan laba yang diperoleh dari transaksi murabahah tersebut tidak berubah atau berkurang. Kondisi ini akan tetap ada sampai anggota melunasi utang mereka kepada BMT.

Secara umum, murabahah mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) BMT harus memberi tahu anggota tentang biaya modal, atau harga pokok.
- 2) Syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak pertama harus dipastikan sah dan terbebas dari riba.
- 3) Jika terdapat cacat pada barang penjual harus memberi tahu pembeli sebelum transaksi
- 4) Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus diberitahukan kepada penjual seperti barang bisa dihutang.¹⁰

b. *Bai' Salam*

Dalam bai' salam barang diserahkan dikemudian hari dengan pembayaran dilakukan secara tunai, oleh karenanya harus ada kepastian dalam kualitas, kuantitas, dan kapan waktu penyerahannya.

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008), beberapa ketentuan umum dari akad bai' salam sebagai berikut:

- 1) Jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah harus diketahui secara jelas.
- 2) Ketika hasil produksi diterima dalam keadaan cacat dan tidak sesuai dengan perjanjian, maka anggota harus bertanggung jawab.
- 3) Pihak ketiga dan BMT bisa melakukan akad salam

c. *Bai' Istishna'*

Kontrak penjualan antara BMT dan pembeli disebut bai' istishna. Dalam kontrak ini, BMT menerima pesanan pembeli dan berusaha membuat barang sesuai dengan pesanan tersebut dengan bantuan orang lain. Setelah itu, produk baru dijual kepada anggota pembeli. BMT dan pemesan mencapai kesepakatan tentang harga dan metode pembayaran, seperti pembayaran dengan cicilan, tunggakan dengan jangka waktu

⁹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan Ke. (Jakarta: Gema Insani, 2015). 45.

¹⁰ Yupi Pirdayanti, "Penerapan Akad Murabahah Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Sunan Gunung Djati Bandung)," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 38-44.

tertentu atau pembayaran di muka. Tidak seperti bai' salam, bai' istiṣna' memiliki ketentuan yang sama.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

Pembiayaan BMT secara garis besar dapat dibedakan dalam kegiatan penyaluran dananya berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a. Sewa-Menyewa

Merupakan perjanjian dimana pihak yang menerima manfaat harus membayar uang sewa atau upah jika ingin mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. BMT dalam menggunakan akad ini melalui pembiayaan ijarah mutahia bit tamlik dan ijarah, jenis pembiayaan yaitu:

- 1) Ijarah adalah jenis transaksi di mana keuntungan berpindah. Pada dasarnya, prinsip ini mirip dengan prinsip jual beli, tetapi barang adalah objek transaksi dalam prinsip jual beli, sedangkan jasa adalah objek transaksi dalam prinsip ijarah.¹¹
- 2) Transaksi Muntahia Bit Tamlik (IMBT) hampir sama, tetapi penyewa memiliki opsi untuk membeli barang yang disewa atau disewa, yang akhirnya dimiliki oleh penyewa.

- b. Prinsip Jasa

Disebut pembiayaan jasa karena pada prinsipnya dasar perjanjian yaitu ta'awun dan baarru'i yaitu perjanjian yang tujuannya untuk membantu dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan, jenis-jenis pembiayaan yaitu:¹²

- 1) *Wakalah*, berarti BMT menjadi wakil dalam penanaman investasi yang dilakukan investor kepada anggota. Tergantung dengan kesepakatan pihak masing-masing. Manajemen fee yang besar bisa diterapkan dalam jasa ini.
- 2) *Kafalah* merupakan pemenuhan kewajiban kepada pihak yang ditanggihkan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung. Oleh karena itu kafalah mengacu pada pengalihan kewajiban orang yang dijamin pada orang yang menjaminkannya.
- 3) *Hawalah* atau *hiwalah* yaitu si penanggung menerima pengalihan hutang. Ada 3 bentuk dalam peraktiknya yaitu:
 - a) *Factoring* atau anjak piutang, BMT mendapatkan pengalihan hutang dari anggota dan membayarnya ke pada nasabah, kemudian nanti BMT akan menagih kembali kepada anggota yang berhutang.
 - b) Pengawasan setelah tanggal, di mana tanpa harus mengganti terlebih dahulu BMT harus menjadi hurus tagih atas piutang nasabah
 - c) Pengurangan rekening, yang pada dasarnya sama dengan hawalah.
- 4) *Rahn*, adalah menahan properti peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepadanya.

- c. Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial

Dalam BMT hal ini disebut pembiayaan qardh yang artinya mengembalikan pokok pinjaman dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dengan proses peminjaman tanpa imbalan dengan pihak peminjam.¹³

Mengingat bahwa BMT adalah lembaga keuangan syari'ah yang bergerak pada tataran masyarakat menengah ke bawah, secara teoritis ada banyak produk yang dapat dilakukan oleh BMT, dalam hal penyaluran dana atau penghimpunan dana. Oleh karena itu, BMT berbeda

¹¹ Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*. 158.

¹² Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*. 159-160.

¹³ Suhendi, *BMT Dan Bank Islam*. 32.

dari lembaga keuangan lain seperti bank umum syariah dan BPRS karena sumber dayanya yang relatif kecil, baik itu sumber daya manusia yang kurang memahami konsep kesyariahan maupun sumber daya lainnya. Penghimpunan dan penyaluran dana wadi'ah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah adalah beberapa jenis pembiayaan dan pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh BMT.¹⁴

Analisis Implementasi Akad dalam *Student Loan* di BMT UMY

Dalam penerapan pembiayaan pendidikan berbasis syariah, BMT UMY menggunakan beberapa jenis akad syariah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan karakteristik dari program *student loan*. Akad-akad yang digunakan dalam *student loan* di BMT UMY harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Beberapa jenis akad yang dapat diterapkan adalah *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* multijasa. Berikut adalah deskripsi dari masing-masing akad yang relevan:

1. *Murabahah*

Merupakan akad jual beli di mana BMT UMY memberikan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa dengan cara membeli barang atau jasa yang diperlukan, dan kemudian menjualnya kembali kepada mahasiswa dengan harga yang telah disepakati, dengan tambahan margin keuntungan yang jelas. Mekanisme akad *murabahah* dalam *student loan* di BMT UMY:

- a. Pemberian pembiayaan, BMT UMY memberikan pembiayaan untuk keperluan pembelian sarana penunjang perkuliahan (misalnya membeli laptop, buku) kepada mahasiswa yang membutuhkan. BMT UMY membeli sarana pendidikan tersebut kepada penyedia barang, dan kemudian menjualnya kembali kepada mahasiswa dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. Margin keuntungan yang jelas, harga jual yang lebih tinggi ini merupakan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya, dan harus diketahui oleh kedua belah pihak (BMT dan mahasiswa) sejak awal transaksi. Margin keuntungan ini juga harus sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu tidak boleh memberatkan mahasiswa.
- c. Cicilan pembayaran, dalam jangka waktu yang telah disepakati pembayaran dilakukan secara cicilan. Pembayaran angsuran ini dilakukan secara bulanan atau sesuai dengan kesepakatan antara BMT UMY dan mahasiswa, dengan tenggat waktu yang jelas.
- d. Keunggulan dari akad *murabahah* adalah kepastian harga yang harus dibayar oleh mahasiswa dan tidak adanya unsur bunga atau riba. Proses pembayarannya pun bersifat jelas dan transparan.

2. *Mudharabah*

Merupakan akad dua pihak yang bekerja sama, di mana BMT UMY bertindak sebagai penyedia modal (*shohibul mal*), sedangkan pihak mahasiswa bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam konteks *student loan*, akad ini bisa diterapkan dalam skema pembiayaan yang lebih fleksibel, terutama apabila mahasiswa ingin menggunakan dana tidak hanya untuk kegiatan yang tidak terbatas hanya pada pembayaran biaya kuliah, tetapi juga untuk biaya operasional pendidikan lainnya, seperti kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Atau mahasiswa ingin berwirausaha. Mekanisme *mudharabah* dalam *student loan* di BMT UMY:

¹⁴ Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*. 160.

- a. Pemberian modal, BMT UMY menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan mahasiswa, dan mahasiswa menggunakan dana tersebut untuk tujuan pendidikan yang telah disepakati.
 - b. Bagi hasil, setelah mahasiswa selesai menempuh pendidikan dan memulai karier atau usaha (jika relevan), maka hasil (seperti gaji atau pendapatan) akan dibagi antara BMT UMY dan mahasiswa sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya.
 - c. Keuntungan dan risiko, dalam akad mudharabah, keuntungan yang diperoleh dari usaha atau pendapatan setelah pendidikan akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disetujui sebelumnya. Namun, jika tidak ada keuntungan yang diperoleh, maka risiko kerugian ditanggung oleh penyedia modal (BMT UMY), sementara mahasiswa tidak wajib membayar lebih dari modal yang telah diterima.
 - d. Akad mudharabah memberikan fleksibilitas dan keseimbangan dalam pembiayaan pendidikan, terutama jika mahasiswa berencana untuk memulai usaha atau bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Skema ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BMT UMY dan mahasiswa.
3. *Musarakah*
Akad musarakah adalah akad kemitraan di mana kedua belah pihak (BMT UMY dan mahasiswa) menyumbangkan modal untuk tujuan yang sama. Dalam konteks *student loan*, akad ini dapat diterapkan apabila mahasiswa dan BMT UMY melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, seperti pengembangan kemampuan kewirausahaan atau penelitian yang membutuhkan dana yang lebih besar dan fleksibel. Mekanisme musarakah dalam *student loan* di BMT UMY:
- a. Kemitraan modal, BMT UMY dan mahasiswa sama-sama menyumbangkan modal untuk membiayai pendidikan atau proyek pendidikan (misalnya, riset atau kewirausahaan mahasiswa). BMT UMY memberikan sebagian dana, sementara mahasiswa mungkin turut berkontribusi dengan modal pribadi atau melalui upaya mereka (misalnya, kerja paruh waktu atau usaha kecil-kecilan).
 - b. Pembagian hasil dan risiko, keuntungan yang diperoleh dari pendidikan atau usaha yang dijalankan oleh mahasiswa (seperti hasil penelitian, usaha sampingan, atau gaji yang diperoleh setelah lulus) akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Begitu pula dengan risiko kerugian, yang akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak.
 - c. Keuntungan dan pengembangan bersama, melalui akad ini BMT UMY dan mahasiswa berkomitmen untuk bersama-sama membangun potensi yang ada. Ini mengarah pada tujuan saling memberdayakan, di mana baik mahasiswa maupun lembaga memperoleh keuntungan dari kesuksesan pendidikan dan usaha yang dijalankan.
 - d. Akad musarakah dapat memberi mahasiswa rasa tanggung jawab yang lebih besar, karena mereka juga turut berkontribusi dalam pembiayaan. Di sisi lain, BMT UMY juga akan mendapat bagian dari hasil yang dihasilkan oleh mahasiswa, sesuai dengan prinsip bagi hasil yang adil.
4. *Ijarah Multijasa*
Merupakan akad yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan mahasiswa, seperti pembayaran uang kuliah, pelatihan, atau jasa pendidikan lainnya. Model ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan manfaat jasa pendidikan kepada mahasiswa, dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap oleh mahasiswa atau pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Jika pinjaman

mahasiswa berbentuk uang cash maka bisa menggunakan akad ini. Mekanisme akad *ijarah* multijasa dalam *student loan* di BMT UMY:

- a. Kerjasama antara perguruan tinggi dan BMT UMY
Dalam mekanisme ini, perguruan tinggi telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah BMT UMY. Kerjasama ini memastikan adanya alur pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas *student loan* untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).
- b. Jumlah pinjaman berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Besaran pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu semester. Hal ini bertujuan agar pinjaman mencukupi kebutuhan pendidikan mahasiswa tanpa memberikan beban finansial yang berlebihan.
- c. Jangka waktu pinjaman 5 bulan
Mahasiswa diberikan waktu selama lima bulan untuk melunasi pinjaman. Jangka waktu ini biasanya mencakup sebagian besar masa perkuliahan dalam satu semester, sehingga memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap.
- d. Sanksi jika tidak membayar cicilan
Apabila mahasiswa gagal membayar cicilan sesuai perjanjian, maka ada sanksi akan dikenakan. Sanksi tersebut berupa penghentian akses sistem akademik, sehingga mahasiswa tidak dapat melanjutkan proses perkuliahan sebelum kewajiban pinjaman diselesaikan. Hal ini menjadi bentuk komitmen dalam menjaga kepatuhan terhadap akad.
- e. Persyaratan pengajuan pinjaman
Persyaratan untuk menggunakan akad *ijarah* multijasa ini serupa dengan akad lainnya di BMT UMY. Namun, untuk akad ini, mahasiswa diwajibkan mengajukan pinjaman pendidikan bersama dengan orang tua. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya tanggung jawab bersama antara mahasiswa dan orang tua terkait pelunasan pinjaman.
- f. Mekanisme akad *ijarah* multijasa dalam *student loan* di BMT UMY memberikan solusi pembiayaan pendidikan yang sesuai syariah dengan regulasi yang terstruktur. Proses ini membantu mahasiswa membayar UKT secara bertahap sambil tetap mempertahankan tanggung jawab pembayaran melalui sanksi dan keterlibatan orang tua.

Penerapan akad di atas memberikan berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memperoleh dana pendidikan. Setiap akad memiliki kelebihan dan tantangan yang harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam pembiayaan ini. Pembiayaan pendidikan berbasis syariah ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam mewujudkan cita-citanya, tetapi juga membangun hubungan saling memberdayakan antara lembaga pendidikan dan mahasiswa yang lebih berkelanjutan.

Manfaat dan Tantangan Implementasi *Student Loan* di BMT UMY

Adapun manfaat dari program yang digulirkan oleh BMT UMY dalam bentuk pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa yaitu memberikan akses biaya pendidikan yang mudah sehingga mahasiswa dapat melanjutkan studinya meskipun mengalami keterbatasan finansial. Selain itu penanaman pendidikan karakter dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada mahasiswa, karena pembiayaan berbasis syariah mengajarkan nilai-nilai amanah,

tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi solusi bagi mahasiswa untuk menghindari pinjaman yang berbasis bunga atau sistem riba. Disamping itu, peningkatan akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga membuat orang tua merasa terbantu dengan adanya lembaga yang mendukung pinjaman biaya pendidikan anak tanpa tekanan finansial, dan citra kampus menjadi lebih baik artinya program yang dijalankan oleh BMT UMY ini mendukung reputasi kampus sebagai institusi yang peduli terhadap keberlangsungan studi mahasiswa.

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh BMT UMY dalam program ini merupakan bentuk penguatan peran sosial dan ekonomi artinya memperkuat citra BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan aktif dalam pemberdayaan pendidikan dan sosial ekonomi kepada masyarakat. Selain itu sebagai salah satu peluang dalam pengembangan produk yang ada di BMY UMY. Dengan adanya produk pembiayaan pendidikan membuka ruang inovasi produk syariah yang lebih variatif dan kontekstual, sehingga mampu memenuhi kebutuhan akses keuangan kepada masyarakat secara luas.

Tantangan yang dihadapi dalam program pembiayaan pendidikan yang di lakukan oleh BMT UMY adalah ada sebagian mahasiswa dan orang tua belum sepenuhnya memahami konsep pembiayaan syariah dan akad-akad yang digunakan, sehingga memerlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dari mahasiswa cukup tinggi, terutama karena mayoritas mereka belum memiliki penghasilan tetap. Hal ini membuat BMT UMY harus melakukan manajemen pengelolaan risiko pembiayaan dengan baik seperti menganalisis dengan menyeluruh kelayakan dengan melihat *track record* akademik dan keuangan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan pendidikan serta menerapkan kesesuaian akad dengan kebutuhan mahasiswa. Pengelolaan risiko dalam pembiayaan pendidikan di BMT UMY harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari seleksi awal, edukasi, pendampingan, hingga pengawasan. Tujuannya agar pembiayaan tetap berjalan lancar, prinsip syariah terjaga, dan mahasiswa tidak terbebani secara berlebihan. Disamping itu juga BMT harus memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tidak menyimpang dari prinsip syariah dan tetap patuh pada regulasi keuangan yang berlaku.

PENUTUP

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan kemajuan sosial-ekonomi suatu negara. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas, terutama karena tingginya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, lembaga-lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, menawarkan berbagai program pembiayaan yang dapat membantu mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Salah satu jenis pembiayaan pendidikan yang semakin banyak digunakan adalah program *student loan*, atau pinjaman pendidikan, yang disalurkan oleh lembaga keuangan berbasis prinsip syariah. BMT UMY sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak bagi mahasiswa.

Dalam program *student loan* di BMT UMY, dalam penerapan akad bergantung pada kebutuhan spesifik mahasiswa dan tujuan pembiayaan pendidikan yang diberikan. *Murabahah* digunakan jika pembiayaan pendidikan berkaitan dengan pembelian kebutuhan perkuliahan (seperti buku, laptop, alat praktek dan lain-lain) yang bersifat tetap dan jelas. Ini memberikan kepastian harga dan syarat pembayaran. *Mudharabah* digunakan jika mahasiswa akan menggunakan dana pendidikan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan

keuntungan di masa depan, seperti pengembangan kewirausahaan atau riset. *Musyarakah* digunakan jika program pendidikan tersebut melibatkan kerjasama atau kegiatan yang melibatkan lebih banyak modal dan pembagian hasil antara mahasiswa dan BMT UMY. *Ijarah* multijasa yang digunakan untuk membiayai biaya pendidikan mahasiswa, seperti pembayaran uang kuliah, pelatihan, atau jasa pendidikan lainnya.

Dengan menggunakan akad-akad tersebut, BMT UMY dapat memberikan solusi pembiayaan pendidikan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan mereka tanpa terbebani oleh riba atau biaya yang tidak transparan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya pemahaman mahasiswa tentang akad syariah dan risiko gagal bayar. Namun, di sisi lain, program ini memberikan manfaat besar, baik bagi mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan tanpa riba, maupun bagi BMT yang memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang inklusif dan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Cetakan Ke. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2005.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Ridwan. *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Pirdayanti, Yupi. "Penerapan Akad Murabahah Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Sunan Gunung Djati Bandung)." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 38–44.
- Purwati, Yayuk. "Strategi Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam Melalui Tanggung Jawab Sosial (SCR) Studi Kasus BANK BRI Syariah." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2021): 65–78.
- Sami' Abdul Misri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Pusata Pelajar, 2014.
- Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suhendi, Hendi. *BMT Dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Gani Quraisy, 2004.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: Debata, 2008.